

**ANALISIS PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**
(Studi Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016)

TESIS

OLEH

**FIRMAN PANE
NPM. 191801053**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

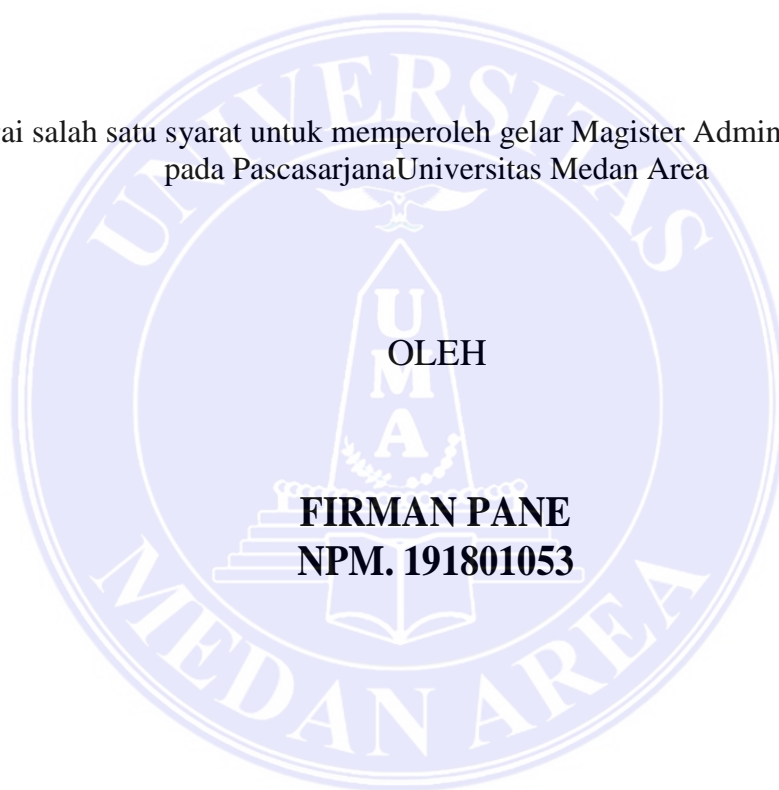
Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

ANALISIS PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Studi Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016)

Nama : Firman Pane

NPM : 191801053

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si



Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

Telah diuji pada Tanggal 14 September 2021

Nama : Firman Pane

NPM : 191801053



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Warjio, MA

Sekretaris : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing I : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si

Pembimbing II : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Penguji Tamu : Dr. Ressi Dwiana, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 14 September 2021

Yang menyatakan,



Firman Pane

5.2 Format Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Firman Pane
NPM : 191801053
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016)**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal : 17 November 2021

Yang menyatakan



(Firman Pane)

A B S T R A K

Analisis Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kematian Ibu Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016)

N a m a : **Firman Pane**
N I M : **191801053**
Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi Publik**
Pembimbing I : **Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si**
Pembimbing II : **Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si**

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Tahun 2015 s/d 2017 mencatat jumlah kematian ibu sebanyak 586,1. Tahun 2016 angka kematian ibu meningkat menjadi 135,9. Menurunkan angka kematian ibu sebagai indikator kunci di dalam target pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Bappeda dalam upaya penurunan angka kematian ibu di Kab. Batu Bara pada tahun 2016? Dan apa saja yang menjadi hambatan Bappeda dalam upaya penurunan angka kematian ibu di Kab. Batu Bara pada tahun 2016? Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Maka hasil penelitian pada *Interpersonal Roles* (Peran Antar Pribadi) pada peran Bappeda Kab. Batu Bara dalam menurunkan angka kematian ibu baik dari Pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat cukup baik. *Informational Roles* (Peran Informasional) pada peran Bappeda telah mengerahkan seluruh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus terutama keterampilan dalam penanganan kasus gawat darurat dalam menangani penyebab utama kematian ibu. Peranan pengambil keputusan (*Decisional Role*) yang di lakukan oleh Bappeda Kab. Batu Bara dengan sektor lain yaitu dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Batu Bara, Dinas Kesehatan, Kelurahan, Kecamatan dan kerjasama lintas sektor dengan instansi lainnya. Peran Bappeda dalam menurunkan angka kematian ibu di Kab. Batu Bara dengan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu yakni dengan membuat kemitraan antara bidan, kader dan tokoh masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana perlu di tingkatkan kualitasnya dan harus di manfaatkan dengan baik untuk menunjang keberhasilan dalam menurunkan angka kematian ibu. *Ambulance* yang tersedia akan lebih optimal bila di sediakan satu unit khusus untuk gawat darurat dan satu *ambulance* untuk kegiatan puskesmas keliling. Dengan meningkatkan penyuluhan, pembagian pamflet dan brosur makanan bergizi dan pemberian informasi tentang kehamilan kepada masyarakat khususnya ibu hamil sehingga dapat di pahami dan di laksanakan. Di harapkan pelaksanaan program penurunan angka kematian ibu dapat di bekali dengan buku pedoman Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Penurunan Angka Kematian Ibu (RAN-PPAKI) 2013-2015 yang di terbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

Kata Kunci: *Analisis, Kabupaten Batu Bara, Peran Bappeda, Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016.*

ABSTRACT

Analysis of the Role of Bappeda in Regional Development Planning (Case Study of Maternal Mortality in Batu Bara Regency in 2016)

N a m e : *Firman Pane*
Student Id. Number : *191801053*
Study Program : *Master of Science Public Administration*
Advisor I : *Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si*
Advisor II : *Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si*

From the Health Office of Batu Bara Regency from 2015 to 2017 recorded the number of maternal deaths as many as 586.1. In 2016 the maternal mortality rate increased to 135.9. Reducing maternal mortality as a key indicator in achieving sustainable development targets. The formulation of the problem in this study is how the role of Bappeda in efforts to reduce maternal mortality in Kab. Batu Bara in 2016? And what are the obstacles for Bappeda in efforts to reduce maternal mortality in Kab. Batu Bara in 2016? The data that the researcher uses in this study is a descriptive qualitative approach. With data collection techniques from interviews, documentation, and observation. So the results of research on Interpersonal Roles on the role of Bappeda Kab. Batu Bara in reducing maternal mortality from the Government, health workers, and the community is quite good. Informational Roles in Bappeda's role has mobilized all health workers who have special competencies, especially skills in handling emergency cases in dealing with the main causes of maternal death. The role of decision makers (Decisional Role) carried out by Bappeda Kab. Batu Bara with other sectors, namely the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Kab. Batu Bara, Department of Health, Village, District and cross-sectoral collaboration with other agencies. The role of Bappeda in reducing maternal mortality in Kab. Batu Bara by increasing the coverage and quality of maternal health services, namely by establishing partnerships between midwives, cadres and community leaders. Suggestions in this study are facilities and infrastructure need to be improved in quality and must be used properly to support success in reducing maternal mortality. The available ambulances will be more optimal if one special unit is provided for the emergency department and one ambulance for the activities of the mobile health center. By increasing counseling, distributing pamphlets and brochures on nutritious food and providing information about pregnancy to the public, especially pregnant women, so that they can be understood and implemented. It is hoped that the implementation of the maternal mortality rate reduction program can be equipped with the 2013-2015 National Action Plan for the Implementation of Maternal Mortality Reduction (RAN-PPAKI) guidelines published by the Ministry of Health.

Keywords: *Analysis, Bappeda's Role, Kabupaten Batu Bara, Regional Development Planning 2016.*

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Magister Administrasi Publik (MAP) di Universitas Medan Area Medan. Dengan tersusunnya tesis ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada penulis di antaranya yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis.
5. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memotivasi penulis.
6. Bapak Dr. Budi Hartono, SE, M.Si selaku Sekretaris yang telah membimbing penulis.
7. Kedua orang tua yang telah memberikan do'a, kasih sayang, dorongan, semangat kepada penulis dalam berbagai hal baik, terutama dalam penyusunan tesis ini.

8. Teruntuk Istri tercinta atas segala motivasi dan do'a.
9. Rekan-rekan seperjuangan Magister Administrasi Publik angkatan Tahun 2019 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya tesis ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat-Nya selalu. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya, maupun bagi yang memerlukan bagi umumnya.

Medan, Oktober 2021



Firman Pane

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan.....	11
2.2 Perencanaan Pembangunan.....	13
2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah	14
2.3.1 Jenis Perencanaan Pembangunan	16
2.3.2 Tahapan Perencanaan Pembangunan	17
2.4 BAPPEDA	20
2.5 Kebijakan Publik.....	22
2.5.1 Kebijakan Publik dalam Perencanaan Pembangunan	25
2.6 Penelitian Terdahulu	29
2.7 Kerangka Pemikiran.....	40

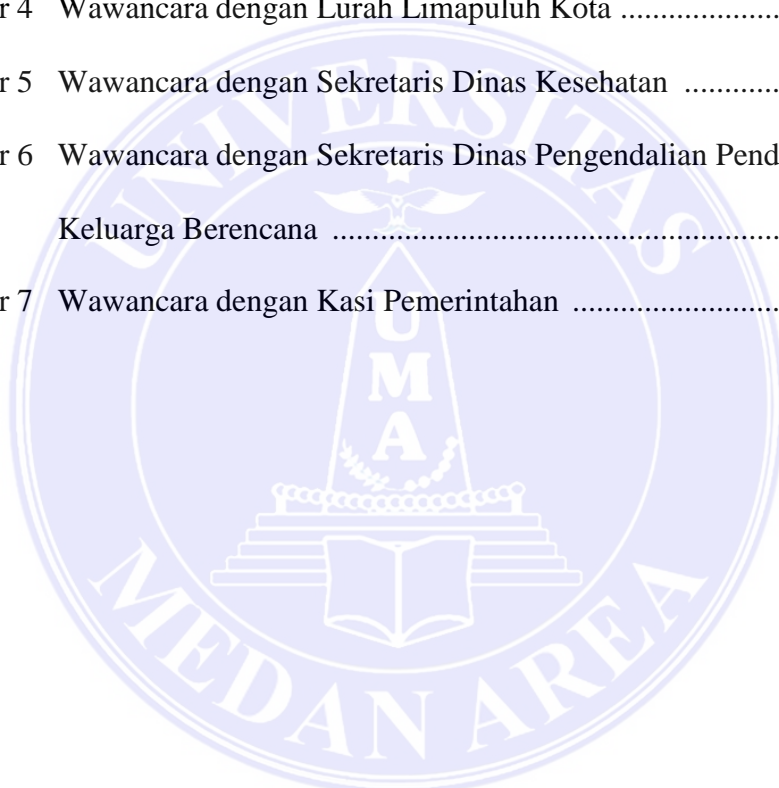
BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Informan Penelitian.....	42

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Teknik Analisis Data.....	44
3.5.1 Reduksi Data	44
3.5.2 Penyajian Data.....	45
3.5.3 Verifikasi	45
3.6 Definisi Konsep Dan Operasional	46
3.6.1 Definisi Konseptual.....	46
3.6.2 Definisi Operasional.....	47
3.6.2.1 Teori Peran	47
3.6.2.2 Tupoksi Bappeda.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	50
4.1.1 Deskripsi Umum Bappeda.....	50
4.1.2 Visi Misi	52
4.1.3 Struktur Organisasi.....	52
4.1.4 Ruang Lingkup Bidang Kegiatan	54
4.2 Hasil Penelitian	58
4.3 Hambatan Bappeda	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1 Kerangka Pemikiran	40
Gambar 2 Struktur Organisasi	54
Gambar 3 Wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara	85
Gambar 4 Wawancara dengan Lurah Limapuluh Kota	85
Gambar 5 Wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan	86
Gambar 6 Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	86
Gambar 7 Wawancara dengan Kasi Pemerintahan	87



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Jumlah Kematian Ibu	4
Tabel 1.2 Angka Kematian Ibu Dinas Kesehatan	6
Tabel 1.3 Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.4 Perkembangan Jumlah Tenaga Teknis	73
Tabel 1.5 Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan	76



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Waktu Penelitian
- Lampiran 2 Dokumen Wawancara
- Lampiran 3 Surat Riset Penelitian
- Lampiran 4 Surat Hasil Riset Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih serba baik, secara material maupun spiritual. Dan pembangunan nasional pada hakikatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Dan pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah (Ramadhan, 2017).

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana. Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, dimana pada hakikatnya daerah menjadi tempat terakumulasinya program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya (Ramadhan, 2017). Tercantumnya

pelayanan kesehatan sebagai hak masyarakat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3), menempatkan status sehat dalam pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat. Fenomena demikian merupakan keberhasilan pemerintah selama ini dalam kebijakan politik di bidang kesehatan, yang menuntut pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan upaya kesehatan secara tersusun, menyeluruh dan merata.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan cukup besar kepada Kabupaten/Kota termasuk dalam bidang kesehatan, maka peluang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota cukup besar untuk mengatur sistem kesehatannya termasuk sistem perencanaan. Namun demikian, desentralisasi perencanaan kesehatan sebagai salah satu faktor esensial dalam proses desentralisasi merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan kerjasama yang harmonis diantara penentu kebijakan, perencana, tenaga administrasi dan masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan tekad yang kuat dan kesiapan yang cukup matang untuk menata dan memperkuat sistem perencanaan kesehatan pada masing-masing Kabupaten/Kota. Suatu hal yang dapat dikemukakan sebagai masalah pokok dalam implementasi perencanaan kesehatan pada Kabupaten/Kota adalah sistem perencanaan kesehatan kurang efektif dalam mengakomodir kebutuhan dan permasalahan kesehatan masyarakat setempat. Kesehatan

merupakan salah satu aspek yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah, yang pada awalnya bersifat *top-down* (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) sekarang menjadi *bottom-up* (dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat). Otonomi daerah bidang kesehatan memberikan kesempatan yang banyak kepada pemerintah untuk mengeksplorasi kemampuan daerah dari berbagai aspek, mulai dari komitmen pemimpin dan masyarakat untuk membangun kesehatan, sistem kesehatan daerah, manajemen kesehatan daerah, dana, sarana, dan prasarana yang memadai, sehingga diharapkan kesehatan masyarakat di daerah menjadi lebih baik dan tinggi.

Otonomi daerah di bidang kesehatan bertujuan untuk menumbuhkan sifat kebaikan dan adil dalam bidang kesehatan, karena setiap daerah mempunyai kewenangan untuk membuat formulasi baru sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Demikian pula halnya di daerah Kabupaten Batu Bara, dalam melakukan perencanaan pembangunan kesehatan senantiasa perlu memperhatikan perencanaan pembangunan yang dapat mengakomodasi keinginan masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Batu Bara itu sendiri dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Serta tugas perencanaan pembangunan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan kerjasama lintas sektoral, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas-Dinas Lain. Angka kematian ibu merupakan indikator pembangunan kesehatan dan indikator pemenuhan hak reproduksi serta kualitas dalam

pemanfaatan kesehatan secara umum. Kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu bangsa di ukur dengan tinggi rendahnya angka kematian ibu dalam 100.000 persalinan hidup (Lestaria, Bahar, & Munandar, 2016). Angka kematian ibu menjadi indikator penting dalam keberhasilan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal untuk suatu bangsa. Penilaian terhadap kinerja upaya kesehatan ibu sangat penting untuk di lakukan pemantauan karena hal ini merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan negara (Lestaria, Bahar & Munandar, 2016). Dapat dilihat di bawah ini bagaimana data angka kematian ibu di Sumatera Utara pada Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Kematian Ibu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu
1.	Nias	3
2.	Mandailing Natal	21
3.	Tapanuli Selatan	8
4.	Tapanuli Tengah	11
5.	Tapanuli Utara	5
6.	Toba Samosir	3
7.	Labuhan Batu	11
8.	Asahan	13
9.	Simalungun	5
10.	Dairi	6
11.	Karo	7
12.	Deli Serdang	19
13.	Langkat	13
14.	Nias Selatan	7
15.	Humbang Hasundutan	6
16.	Pakpak Bharat	2

17. Samosir	2
18. Serdang Bedagai	7
19. Batubara	12
20. Padang Lawas	6
21. Padang Lawas Utara	4
22. Labuhan Batu Selatan	8
23. Labuhan Batu Utara	7
24. Nias Utara	5
25. Nias Barat	11
26. Sibolga	0
27. Tanjungbalai	5
28. Pematang Siantar	4
29. Tebing Tinggi	4
30. Medan	3
31. Binjai	6
32. Padang Sidempuan	10
33. Gunung Sitoli	5
<hr/>	
Jumlah (Kabupaten/Kota)	239
Angka Kematian Ibu (Dilaporkan)	85

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2016

Ditinjau berdasarkan laporan profil kesehatan Kab/Kota (Tabel 1.1) jumlah kematian ibu pada tahun 2016 dilaporkan tercatat sebanyak 239 kematian. Namun bila dikonversi, maka berdasarkan profil Kabupten/Kota maka angka kematian ibu di Sumatera Utara adalah sebesar 85/100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut jauh berbeda dan diperkirakan belum menggambarkan angka kematian ibu yang sebenarnya pada populasi terutama bila dibandingkan dari hasil Sensus Penduduk 2010. Berdasarkan estimasi tersebut, maka angka kematian ibu

nyatanya belum mengalami penurunan hingga tahun 2016. Untuk lebih jelasnya berikut data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Ibu Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2020

No.	Kasus Kematian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Neonatal	23	25	26	19	27
2.	Bayi	30	25	26	21	28
3.	Balita	35	25	27	23	28
4.	Ibu	13	11	8	10	7

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2016 mencatat jumlah kematian ibu meningkat. Dan di Tahun 2017 berhasil menurunkan angka kematian ibu. Kebijakan Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu melalui program-program kegiatan sehingga menurun di tahun 2017 di karenakan meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia, kemudian adanya pelatihan-pelatihan kepada bidan untuk menangani ibu-ibu hamil, melakukan pemeriksaan rutin dan pemantauan kepada ibu-ibu hamil melalui bidan desa serta adanya ketersediaan obat, adanya kelengkapan alat-alat kesehatan yang memadai, serta dokter selalu siap berada di tempat. Peningkatan di tahun 2016 tersebut menjadi fenomena penting untuk diteliti lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebabnya. Menurunkan angka kematian ibu sebagai indikator kunci di dalam target pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, merupakan upaya yang sangat berat dan sampai saat ini belum bisa memenuhi tujuan dan harapan.

Penyebab tingginya angka kematian ibu jauh lebih kompleks dari sekedar permasalahan di sektor kesehatan. Keduanya bukan permasalahan milik sektor kesehatan saja (Dinas Kesehatan). Dari faktor sosial terdiri dari lingkungan yang belum adanya pelayanan atau sosialisasi terhadap pengecekan ibu hamil. Dari faktor ekonomi dengan adanya keterlambatan biaya, sehingga masyarakat tidak melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Maka Bidan Desa menjadi pilihan alternatif. Dan faktor pendidikan yang ditemukan dengan rendahnya pendidikan masyarakat yang tidak memikirkan bagaimana resiko ibu hamil, apatis dengan melakukan pemeriksaan rutin, kekurangan vitamin, yang akan menyebabkan gizi buruk, stunting dan prematur terhadap anak juga berperan terhadap kasus kematian ibu. Untuk lebih jelasnya berikut data yang didapatkan dari Kabupaten Batu Bara Dalam Angka 2021.

Tabel 1.3 Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Batu Bara 2017-2020

No.	Tingkat Pendidikan	2017	2018	2019	2020
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,38	1,64	0,83	0,91
2.	Tidak Tamat SD	23,37	22,68	22,28	22,91
3.	SD dan Sederajat	25,63	28,99	26,16	23,25
4.	SLTP dan Sederajat	23,32	20,57	20,92	22,40
5.	SLTA dan Sederajat	24,31	21,39	25,59	25,79
6.	Diploma I, II dan III	0,53	1,31	0,96	0,81
7.	DIV/Sarjana/Pasca Sarjana	2,45	3,42	3,26	3,85

Sumber Data: Batu Bara Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Batu Bara di angka tertinggi 25,63 pada Tahun 2017 hanya sampai SD dan Sederajat. Data dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh dengan angka kematian ibu. Maka dari itu Bappeda memegang kunci dalam mengarahkan sumber daya yang dimiliki untuk penanganan permasalahan. Selain dana, sumber daya berupa *stakeholder* perlu diarahkan untuk membangun kolaborasi yang harmonis dalam melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah terutama Bappeda untuk lebih memaksimalkan potensinya dalam melakukan integrasi dan membangun kolaborasi antar *stakeholder* baik di level pemerintah maupun masyarakat (tokoh masyarakat atau tokoh agama).

Untuk itu perlu di ketahui apa arti dari pada tugas pokok Bappeda beserta prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana peran yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batu Bara dalam upaya penurunan angka kematian ibu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Bappeda dalam upaya penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2016?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Bappeda dalam upaya penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Batu Bara tahun 2016.
2. Untuk menganalisis hambatan Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Batu Bara tahun 2016.

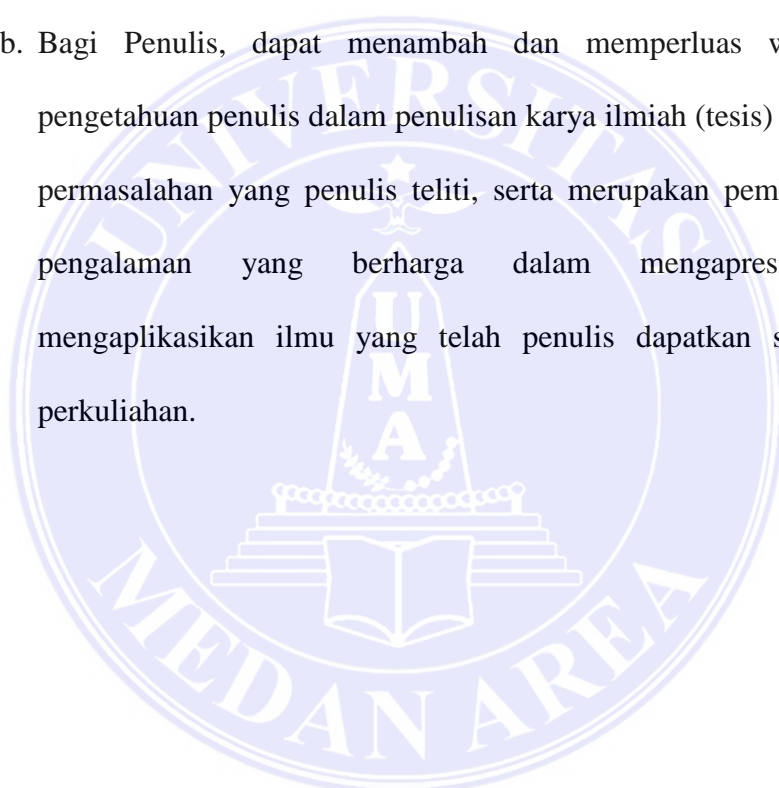
1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penulisan atau penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat menunjang bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik (studi kebijakan publik), serta memperkaya kepustakaan di bidang perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan dan dapat mendukung atau bahan masukan ataupun komparasi bagi yang akan melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Batu Bara ini diikuti dengan komitmen yang kuat dari *stakeholder* kesehatan, baik itu Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, dan lainnya dalam pemerintahan serta masyarakat di Kabupaten Batu Bara.
- b. Bagi Penulis, dapat menambah dan memperluas wawasan atau pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah (tesis) terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, serta merupakan pembelajaran atau pengalaman yang berharga dalam mengapresiasi dan mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono, 2002). Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status social. Syarat-syarat peran mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat

yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Peran ini dapat dilihat dari beberapa pengukuran yaitu Thoha (2012: 21):

1. Peran antar pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini.
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini.
3. Peranan pengambil keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya.

2.2 Perencanaan Pembangunan

Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyaningsih, 2014: 92). Nitisastro (2014: 92) memperincikan apa yang tercakup dalam perencanaan pembangunan, bahwa perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan.

Perencanaan pembangunan adalah melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan (Listyaningsih, 2014: 93). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Dari definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang dipilih dan dilakukan secara sadar untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan guna untuk meningkatkan kesejahteraan suatu pembangunan.

2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil sebuah uraian secara konvergensi, akan membentuk suatu pengertian yang utuh. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (Nugroho D, 2006: 41), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana.
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.

5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan.
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan diatas memang harus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan pembangunan karena hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan pembangunan maka sebelum merumuskan perencanaan pembangunan unsur-unsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu. Menurut Riyadi dan Deddy (Asrofi, 2005: 7) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Siagian dalam Riyadi (2005: 263) Pengawasan ialah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan evaluasi didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai, dan tujuan pengawasan perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk:

1. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Mengetahui apakah unit-unit melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

3. Mengetahui apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh setiap unit atau instansi atau para pelaksana proyek dengan pihak-pihak terkait.
4. Mencegah dan mengendalikan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat dihindari.

2.3.1 Jenis Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis. Mengikuti Lincoln Arsyad (2001), menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu:

- a. Perencanaan Jangka Panjang
- b. Perencanaan Jangka Menengah
- c. Perencanaan Jangka Pendek

Pengertian dari masing-masing jenis Perencanaan Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan Jangka Panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era orde baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Sedangkan rencana pembangunan jangka panjang, baik Nasional maupun Daerah mencakup waktu 20 tahun.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan Jangka Menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan Presiden atau Kepala Daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun

baik oleh Pemerintah Nasional maupun Pemerintah Daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Selain itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya besar perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sehingga sering dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Karena itu, rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat Nasional (RAPBN) maupun pada tingkat Daerah (RAPBD). Rencana tahunan yang mencakup kesemua sektor dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD).

2.3.2 Tahapan Perencanaan Pembangunan

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 4 tahapan perencanaan pembangunan:

1. Penyusunan rencana

2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang meliputi:

- a. Indikator masukan
- b. Indikator keluaran
- c. Indikator hasil atau manfaat

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*), evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*).

1. Tahap Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik Bappenas untuk tingkat Nasional dan Bappeda untuk tingkat Daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi misi serta arah pembangunan. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat

tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat mulai menyusun rencana awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menerima tanggapan baik dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, alim ulama, dan para tokoh Lembaga Sosial Masyarakat setempat.

2. Tahap Penetapan Rencana

Sesuai ketentuan berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut.

3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui OPD terkait. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama OPD bersangkutan.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yang paling kurang didasarkan atas 3 unsur utama yaitu unsur masukan (*input*) terutama dana, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Disamping itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan kurangnya manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut.

2.4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Pembentukan Bappeda Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda RI, yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang pertama, Bappeda tingkat I (sekarang Pemerintahan Provinsi) dan Bappeda tingkat II (sekarang Pemerintahan Kabupaten/Kota). Bappeda merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mana badan ini menurut aturan KEPRES Nomor 27 Tahun 1980, dalam Bab I bahwa badan ini adalah Badan Staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dimana Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam implementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya maka Pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dalam Pasal 23 di tegaskan sebagai berikut: “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda". Dengan demikian Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan. Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan tugasnya dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan untuk memperbaharui pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara. Bappeda Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penilaian, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan daerah. Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Tahun 2016 adalah:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah.

- b. Pelaksanaan penyusunan program-program sebagai pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan di antara Dinas-Dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, Kecamatan dan badan-badan lainnya.
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pembangunan daerah.
- e. Pelaksanaan persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta menyusun statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
- f. Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah.
- g. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-

keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures*, *complex side effects*, *motivation failures*, *rentseeking*, *second best theory*, *implementation failures* (Hakim, 2002).

Kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan
- b. Pelaksanaan dan pengendalian
- c. Evaluasi kebijakan

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Penilaian kebijakan

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai

berikut:

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakikat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peran serta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai

tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

2.5.1 Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Pembangunan

Menurut William Dunn (2000: 1) definisi analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, Dunn (2000: 131) menambahkan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam membuat analisis kebijakan publik, seorang analisis akan melalui tahap-tahap kerangka pemikiran sebagaimana yang dikemukakan oleh Dunn (2000), yaitu:

1. Merumuskan masalah-masalah kebijakan. Yaitu kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Meramal masa depan kebijakan. Peramalan (*forecasting*) adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.
3. Rekomendasi aksi-aksi kebijakan. Prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan analisis menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya. Didalamnya terkandung informasi mengenai aksi-aksi

kebijakan, konsekuensi di masa depan setelah melakukan alternatif tindakan, dan selanjutnya ditentukan alternatif mana yang akan dipilih.

Jadi kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan atau proses pembangunan nasional, baik itu perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana kerja pembangunan (RKP) serta APBN/APBD berkaitan dengan kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut termasuk taktik dan strategi pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk tersebut adalah masyarakat, dan pada hakikatnya pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebutlah yang menjadi intisari dari kebijakan publik yang telah disebutkan diatas (Budimanta, 2005).

Untuk hal ini maka diperlukan peran serta masyarakat dalam pembuatan perencanaan tersebut, di dalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah haruslah melalui musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah (*bottom up*). Proses tersebut diawali dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang. Jika ditinjau dari proses kebijakan publik ada 4 kegiatan yang meliputi proses perencanaan pembangunan, antara lain adalah:

- a. Perumusan masalah
- b. Perumusan agenda (*agenda setting*)

- c. Perumusan usulan
- d. Pengesahan usulan

Proses tersebut dimulai dari tingkat Musrenbang Desa dimana masyarakat Desa dapat berpartisipasi dan memberikan masukan tentang permasalahan yang sedang dihadapi mereka untuk dibawa ke tingkat Musrenbang Kelurahan lalu Musrenbang Kecamatan dan selanjutnya akan ke Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun Musrenbang Negara yang selanjutnya diproses untuk menjadi agenda pemerintah. Proses ini dilanjutkan dengan penyaringan usulan-usulan yang disesuaikan dengan kepentingan politik dan pemerintah yang dapat menyebabkan bias terhadap kepentingan publik terutama yang diusulkan masyarakat melalui Musrenbang. Selanjutnya setelah tahapan legisasi kepada pemerintah atau DPR/DPRD untuk ditetapkan sebagai peraturan atau Undang-Undang (Sugandhy, Aca & Rustam Hakim, 2007). Dan tentu saja kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan. Karena dalam pelaksanaan kebijakan publik, dalam hal ini pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus mengerti tentang Undang-Undang yang menjelaskan bahwa kontribusi masyarakat juga diharapkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yaitu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan telah dilengkapi dengan peraturan-peraturan pemerintah.

Dan masyarakat juga tentunya harus paham apa fungsi partai-partai politik yang dipercayakan masyarakat untuk duduk di DPR atau DPRD, bahwa setiap parpol harus bisa memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat paling tidak bisa memberikan contoh pada masyarakat tentang pendidikan politik

yang baik, juga bisa mengawal apa yang menjadi aspirasi agar bisa segera menjadi agenda pemerintah. Didalam penentuan kebijakan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dapat melalui 3 jalur:

1. Jalur Musrenbang, dimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya secara langsung sesuai dengan tingkatannya.
2. Jalur Politik atau Partai Politik, dilakukan oleh anggota dewan dalam masa reses.
3. Jalur Birokrasi, bisa dilakukan melalui OPD atau langsung pada kepala daerah.

Adapun masyarakat yang mengerti apa yang menjadi kebutuhannya untuk dimasukkan menjadi kebijakan publik pada perencanaan pembangunan tapi terkendala akan konsep-konsep, aturan, atau prosedur yang ada pada pemerintahan (Abdul, 2001). Disini lah perlunya pemahaman tentang kebijakan publik berhubungan dengan administrasi pembangunan, masyarakat harus memahami aturan-aturan main dalam pelaksanaan kebijakan publik pada sektor pembangunan. Yang mana pelaksanaan tersebut haruslah berpayung hukum, sehingga tidak akan muncul permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan tersebut telah dinyatakan Pasal 4 Huruf d yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut telah menjamin bahwa dalam setiap langkah perencanaan pembangunan baik ditingkat

pusat maupun daerah partisipasi masyarakat wajib untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah (Budi, 2007).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

1. Hasil Penelitian Gusti Zulkarnain Tompo, Andi Gau Kadir, A. Murfhi. (2012)

Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 1, Januari 2012 oleh Gusti Zulkarnain Tompo (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin), Andi Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin), A. Murfhi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin), yang berjudul Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Musrenbang adalah Musrenbang De-sa/Kelurahan, memuat hasil prioritas kegiatan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan RPJM Desa dan permasalahan yang

sedang dihadapi. Musrenbang Kecamatan, memuat daftar prioritas kegiatan pembangunan di tiap desa berdasarkan hasil kesepakatan forum. Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, memuat hasil prioritas kegiatan pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan fungsi dan Rencana Kerja tiap-tiap SKPD. Musrenbang RKPD Kabupaten, merupakan penetapan arah kebijakan pembangunan berdasarkan penyempurnaan hasil prioritas kegiatan ditingkat Kecamatan dan Rencana kerja masing-masing SKPD berupa penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

- b. Dalam proses perumusan kebijakan teknis, terdapat faktor yang berpengaruh, baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat berjalannya proses tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pendukung adalah, Adanya Koordinasi, Partisipasi Masyarakat, serta Komitmen pemerintah. Faktor penghambat proses perumusan kebijakan antara lain adalah, Penyesuaian atau kesiapan anggaran, Usulan yang terlalu banyak, serta Keterbatasan dokumen penunjang.

Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu berdasarkan riset hasil jurnal penelitian sebelumnya oleh Gusti Zulkarnain Tompo pada Tahun 2012 terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu teori yang digunakan dalam penelitian. Perencanaan pembangunan pada penelitian terdahulu diukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah dengan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kerja

Pemerintah Daerah RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Yaitu perumusan kebijakan umum perencanaan dan penganggaran daerah, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan program atau kegiatan dan penganggaran lintas sektor, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan kesekretariatan badan juga pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sementara studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2016.

2. Hasil Penelitian Agus Iskandar P. (2012)

Jurnal Volume 3 Nomor 1 Maret 2012 oleh Agus Iskandar P. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. JL. Soekarno Hatta Bandar Lampung, dengan judul Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Kebijaksanaan Di Bidang Pembangunan Di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, hasil Musyawarah Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) Kecamatan tersebut oleh BAPPEDA Kabupaten Tanggamus dipadukan dengan program kegiatan dari instansi terkait atau Dinas-Dinas dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus yang kemudian secara intern dibahas dan diolah secara bersama-sama dengan Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Keuangan Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanggamus untuk menyusun strategi dan prioritas pembangunan. Pelaksanaan perumusan Kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan setiap tahunnya, dalam hal ini sudah menjadi tugas rutin dalam rangka memenuhi tuntutan dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat lebih terarah dan dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Pada hakikatnya BAPPEDA sangat membantu tugas Bupati dalam merencanakan dan merumuskan pembangunan, hal ini dapat dilihat dari proses awal sampai dengan proses akhir pembuatan kebijakan pemerintah dalam bentuk kerja tahunan, menengah maupun program jangka panjang.

Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sehubungan dengan hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agus Iskandar P. pada Tahun 2012, memiliki perbedaan dengan analisis penelitian kali ini. Hal ini di buktikan dengan hasil jurnal tersebut bahwa permasalahan yang diambil adalah bagaimanakah peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun kebijaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana wujud koordinasi BAPPEDA dengan Dinas Kesehatan dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Batu Bara.

3. Hasil Penelitian Nabila Zatadini, Sri Sulastusi, S.H., M.Hum, Eka Deviani, S.H., M.H. (2018)

Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara. Fakultas Universitas Lampung.

[Vol 5, Nomor 1 \(2018\)](#) oleh Nabila Zatadini, Sri Sulastusi, S.H., M.Hum. Eka

Deviani, S.H., M.H yang berjudul Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan Dan Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Lampung Utara. Dengan hasil penelitian bahwa peran BAPPEDA telah dilaksanakan dengan merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Peran tersebut dilaksanakan sebagai peran perencana, pengkoordinasi, dan pengendali pelaksanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. BAPPEDA juga mempunyai Bidang Prioritas Pembangunan (Windu Cita) Kabupaten Lampung Utara merujuk pada SK Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang secara konkrit tercermin dalam bentuk kegiatan-kegiatan Pembangunan yang diselenggarakan setiap tahun anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat kesuksesan BAPPEDA dalam pembangunan yaitu kurangnya SDM, kapasitas dan kapabilitas serta kurangnya staf yang memiliki kemampuan dalam mendukung administrasi dan teknis di Kabupaten Lampung Utara.

Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu peran BAPPEDA merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Peran tersebut dilaksanakan sebagai peran perencana, pengkoordinasi, dan pengendali pelaksanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Permasalahan dalam penelitian sebelumnya dirumuskan dengan bagaimana peran Bappeda dalam

peningkatan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan penelitian saat ini merujuk kepada Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.

4. Hasil Penelitian Jembris T Mangar, Jantje Mandey, Burhanuddin Kiyai.

Jurnal oleh Jembris T Mangar, Jantje Mandey dan Burhanuddin Kiyai dengan judul Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan hasil penelitian peranan BAPPEDA dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Barat dapat dilihat dari penyusunan rancangan awal, penghimpunan laporan SKPD, penyelenggaraan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan peraturan daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Barat masih menghadapi banyak masalah dan kendala, dimana masalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di BAPPEDA sendiri, tanggung jawab kerja yang dinilai masih kurang, kurangnya kualitas SDM dikarenakan minim pemahaman terhadap pelaksanaan tugas dalam setiap penyusunan RPJMD hingga, Lemahnya koordinasi antara BAPPEDA dengan jajaran SKPD yang ada di Kabupaten Halmahera Barat.

Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis. Bahwa tujuan penelitian penulis adalah untuk menganalisis bagaimana peran Bappeda dalam studi angka kematian ibu di Kabupaten Batu Bara di tahun 2016.

5. Hasil Penelitian Aisya Ahma dan Lena Satilita. (2016)

Jurnal oleh Aisya Ahma dan Lena Satilita, M.Si pada tahun 2016, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Wonosobotahun 2016. Dengan hasil penelitian bahwa peranan Bappeda Kabupaten Wonosobo dalam melakukan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi secara partisipatif telah melibatkan seluruh pihak mulai dari internal aparatur Bappeda Wonosobo hingga Dinas-Dinas terkait. Hal ini dapat dilihat dari peranan Bappeda Wonosobo dalam melakukan koordinasi, melalui fasilitasi, yaitu memberikan informasi dan laporan yang dilakukan Bappeda Wonosobo melalui rapat monitoring dengan Dinas-Dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo. Peranan Bappeda Wonosobo melalui motivasi, yaitu dalam bentuk kesepakatan dan komitmen bersama antara Bappeda Wonosobo dengan seluruh Dinas-Dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk menetapkan program perencanaan pembangunan ekonomi yang dianggap penting dan prioritas untuk segera diwujudkan. Peranan Bappeda Wonosobo melalui stimulasi, yaitu membangun hubungan kerja yang baik dengan seluruh Dinas-Dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo, dan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal usaha di Kabupaten Wonosobo.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian sebelumnya di bidang perekonomian. Sedangkan pada studi saat ini tujuan penelitian terletak pada bidang perencanaan pembangunan kesehatan.

6. Hasil Penelitian Fahrizanur, Dr. Rita Kalalinggi M.Si, Drs. H Burhanudin, M.Si. (2017)

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, ISSN2477-2631, oleh Fahrizanur, Dr. Rita Kalalinggi M.Si, Drs. H Burhanudin, M.Si yang berjudul Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan pembangunan Di Daerah Kabupaten Paser. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga perencanaan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal khususnya sebagai koordinator pengelolaan pembangunan baik antara instansi pemerintah maupun dengan swasta atau masyarakat.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini terdapat di tujuan penelitian. Dimana tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui apakah program perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan selama ini. Hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan di wilayah Kabupaten Paser dirasakan belum maksimal dan merata serta untuk mengatur faktor pendukung dan kendala yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melaksanakan perannya.

7. Hasil Penelitian Febri Ramadhan. (2017)

Naskah Publikasi. Febri Ramadhan. NIM 12565201126. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang 2017. Dengan judul Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bintan

Utara Kabupaten Bintan Periode 2010-2015. Dengan hasil penelitian dimana melalui variabel peran, maka Bappeda belum berhasil melaksanakan semua peran, dalam merencanakan pembangunan di Pantai Sakera yang akan di jadikan sebagai Resort. Hal ini dapat disimpulkan dari data dan fakta yang ada bahwa sampai saat ini pembangunan tersebut belum terealisasi ataupun terlaksanakan sebagaimana mestinya. Saran yang perlu diberikan kepada variabel peran yang dilaksanakan oleh Bappeda seharusnya pembangunan resort tersebut dapat terealisasi agar masyarakat disekitar merasakan kinerjanya.

Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari tujuan penelitian dengan penelitian saat ini. Dari penelitian sebelumnya yaitu mengidentifikasi peran Bappeda Kabupaten Bintan dalam melaksanakan penelitian perencanaan pengembangan daerah dan mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi Bappeda Kabupaten Bintan dalam upaya menjalankan perannya secara strategis dan efektif. Penelitian sebelumnya menjelaskan tentang peran Bappeda dalam merencanakan pembangunan di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.

8. Hasil Penelitian Syamsidar. (2020)

Skripsi oleh Syamsidar, NIM 105710219115, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2020. Dengan judul Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Kota Makassar. Dengan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses perencanaan Bappeda kota Makassar mempunyai penyusunan dokumen perencanaan diantaranya RPJP

disusun 25 tahun sekali, RPJMD disusun 5 tahun sekali dan RKPD yang disusun 1 tahun sekali, dimana faktor pendukung tereliasasinya rencana pembangunan kota Makassar yaitu ketersediaan SDM yang memadai, sarana dan prasarana, sedangkan faktor penghambat yaitu penyesuaian anggaran.

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah tujuan penelitian. Dimana penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Kota Makassar.

9. Hasil Penelitian Soleman Andryan Dapakuri. (2020)

Tesis oleh Soleman Andryan Dapakuri, 18610012, Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ApmD” Yogyakarta, 2020 dengan judul Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Di Bappeda Kabupaten Sumba Barat). Dengan hasil penelitian Bappeda telah melakukan proses perencanaan sesuai dengan alurnya, namun ada beberapa persolan yang ada pada Bappeda sehingga kurang optimalnya perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat. Permasalahan peran bappeda dalam perencanaan pembangunan yaitu integrasi data dan informasi sebagai landasan perumusan kebijakan, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran dalam pencapaian pembangunan daerah, peningkatan kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan, sedangkan dalam proses perencanaan yang dilakukan Bappeda Kabupaten Sumba Barat sudah berupaya menjaga konsistensi dokumen RPJMD dari segi arah kebijakan, prioritas pembangunan, namun persoalan yang timbul adalah ketika penjabaran ketingkat OPD masih belum berjalan dengan baik, hal ini di sebabkan keterbatasan data

dasar pembangunan, koordinasi antar perangkat daerah yang masih kurang dan peran serta masyarakat melalui pelembagaan *top down bottom up* yang belum terkoordinasi dengan baik oleh Bappeda.

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah bahwa tujuan penelitian sebelumnya menggambarkan pelaksanaan fungsi oleh BAPPEDA serta model-model pendekatan yang digunakan BAPPEDA dalam melakukan proses perencanaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

10. Hasil Penelitian Rahardian Tetra Andrianto. (2014)

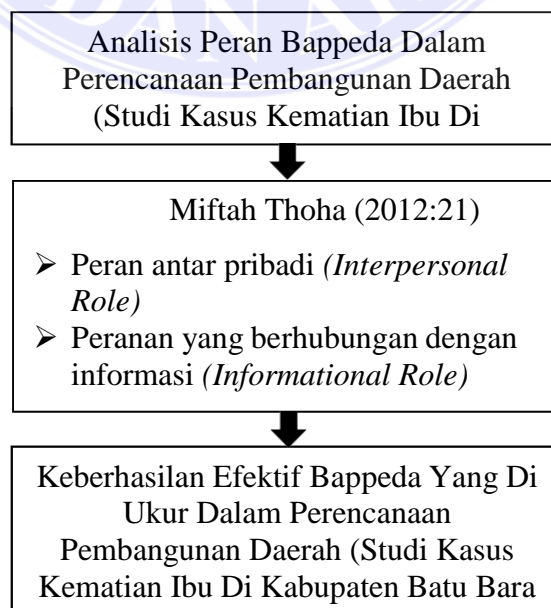
Jurnal oleh Rahardian Tetra Andrianto, 14010112140131, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2014 yang berjudul Peran Bappeda Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Pembangunan Sanitasi Di Desa Jambu Kabupaten Semarang. Dengan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam proses pembangunan sanitasi di Desa Jambu BAPPEDA dalam fungsinya sebagai pelaksana pembangunan mengawasi jalannya pembangunan dalam hal fisik pembangunan maupun penyerapan anggarannya. BAPPEDA juga bertugas melakukan analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan serta menyusun statistik hasil-hasil pembangunan, yaitu berupa Indikator Makro Sosial Ekonomi Daerah dan Deskripsi Potensi Daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, BAPPEDA bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Daerah. Sebagai konsekuensi dari akuntabilitas dan transparansi publik atas penyelenggaraan pembangunan daerah, BAPPEDA bertugas dalam kegiatan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dari metode penelitian dan tujuan penelitian. Metode penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif dan khususnya penelitian metode campuran yang difokuskan pada teknik *purposive sampling* untuk menjelaskan peran BAPPEDA dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi. Sedangkan studi penelitian saat ini menggunakan metode pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Tujuan penelitian sebelumnya untuk menjelaskan hasil dari peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang dan partisipasi masyarakat dalam sanitasi pelaksanaan pembangunan di Desa Jambu, Kabupaten Semarang. Sedangkan tujuan penelitian saat ini adalah untuk menganalisis peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Batu Bara tahun 2016.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:

Gambar 1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Disebut kualitatif, karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif yang menggunakan alat-alat pengukur yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Muhadjir, 2002)

Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat terhadap masalah yang akan diteliti digunakan penelitian kualitatif (Azwar, 2004). Dengan menggunakan metode kualitatif dapat ditemukan data yang tidak teramati dan terukur secara kuantitatif, seperti nilai, sikap mental, kebiasaan, keyakinan dan budaya yang dianut oleh seseorang atau kelompok dalam lingkungan tertentu. Jika ditinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. (Sugiyono, 2005).

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Batu Bara. Sedangkan fokus penelitian yaitu Kantor Bappeda. Yang beralamat di Jl. Besar Desa Simpang Dolok, Limapuluh, Air Hitam, Kec. Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara 21255. Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2021 sampai Mei 2021. Untuk lebih jelasnya terdapat di daftar lampiran 1.

3.3 Informan Penelitian

Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

- a. Informan kunci, yaitu Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara
- b. Informan utama, OPD Kabupaten Batu Bara
- c. Informan tambahan, 3 Camat dan 3 Lurah Kabupaten Batu Bara

Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010: 145).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016: 225) pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang

didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Kepala Bappeda, OPD, Camat dan Lurah Kabupaten Batu Bara. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode. Dalam Penelitian ini untuk memperoleh data tentang masalah yang akan diteliti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Nasution (Metode Research Penelitian Ilmiah, 2006) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi adalah metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
2. Wawancara adalah percakapan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Hal ini senada bahwa wawancara adalah pengumpulan atau dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penyelidikan. (Sugiyono, 2006).

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Batu Bara tahun 2013-2018. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

4. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis (Sukardi, 2003). Metode dokumentasi digunakan untuk menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan,

catatan harian dan sebagainya. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Kantor Bappeda yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di Kantor Bappeda.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bog dan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data.

3.5.2 Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3.5.3 Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif untuk

menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yang merupakan valid. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

3.6 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

3.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya (Azwar, 2007: 72). Konsep dalam penelitian ini adalah peran bappeda dalam penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2016. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “*tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan*”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, Torang 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana wujud koordinasi Bappeda dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2016. Dikarenakan pada tahun 2016 angka kematian ibu meningkat dari tahun 2015. Dimana pada tahun 2015 angka kematian ibu 100.000/kh yang mencapai di angka 93,8 sedangkan di tahun 2016

angka kematian ibu semakin meningkat menjadi 135,9. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengukuhkan legitimasi formal bagi institusi perencanaan di daerah (Bappeda) yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggungjawab. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah menuju kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumberdaya yang tersedia.

3.6.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional, menurut Saifuddin Azwar (2007: 72) adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut:

3.6.2.1 Teori Peran

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Syarat-syarat peran mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Berdasarkan faktor di atas, indikator peran dalam penelitian ini (Thoha, 2012: 21):

- a. Peran antar pribadi (*Interpersonal Role*).
- b. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*).
- c. Peranan pengambil keputusan (*Decisional Role*).

3.6.2.2 Tupoksi Bappeda

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara, maka Bappeda mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vetikal dan horizontal serta pembinaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya serta pihak terkait dan menerapkan prinsip, transparansi dan akuntabilitas.
4. Setiap pejabat struktural dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan pengawasan melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peran Bappeda Kabupaten Batu Bara dalam menurunkan angka kematian ibu baik dari Pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat cukup baik. Jumlah tenaga kesehatan dalam hal ini yaitu bidan sudah banyak tersebar di wilayah Kabupaten Batu Bara. Pelayanan bidan desa di Kabupaten Batu Bara turut di kembangkan yang berawal dari pola hidup masyarakat desa yang tidak lepas dari faktor lingkungan, adat istiadat, ekonomi dan sosial budaya. *Informational Roles* (Peran Informasional) pada peran Bappeda telah mengerahkan seluruh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus terutama keterampilan dalam penanganan kasus gawat darurat dalam menangani penyebab utama kematian ibu. Peran kader dalam menurunkan angka kematian ibu di masyarakat sangat di butuhkan. Secara kualitas dan kuantitas kader yang di libatkan pun seharusnya bisa sesuai dengan kebutuhan. Peranan pengambil keputusan (*Decisional Role*) yang di lakukan oleh Bappeda Kabupaten Batu Bara dengan sektor lain yaitu dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, Dinas Kesehatan, Kelurahan, Kecamatan dan kerjasama lintas sektor dengan instansi lainnya yang mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu sekaligus juga berperan dalam peningkatan derajat kesehatan ibu di wilayah Kabupaten Batu Bara. Peran Bappeda dalam menurunkan

angka kematian ibu di Kabupaten Batu Bara dengan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu yakni dengan membuat kemitraan antara bidan, kader dan tokoh masyarakat.

2. Hambatan Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Batu Bara adalah:

- a. Sarana dan prasarana. Keterlambatan dalam mencapai tempat persalinan serta keterlambatan dalam penanganan yang memadai di karenakan sarana prasarana yang terbatas. Hambatan lain yang di temukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara adalah transportasi. Puskesmas hanya memiliki satu *ambulance* yang multi fungsi. Selain untuk kebutuhan merujuk pasien, *ambulance* juga di gunakan untuk mobilisasi penjemputan ibu hamil dan ibu bersalin.
- b. Sumber daya. Kondisi sosial masyarakat yang berpendidikan rendah sehingga menyebabkan masyarakat berpengetahuan rendah menghambat keberhasilan program penurunan angka kematian ibu. Namun jumlah tenaga kesehatan dalam hal ini yaitu bidan sudah banyak tersebar di wilayah Kabupaten Batu Bara. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga masih di temukannya dukun bayi di Kabupaten Batu Bara.

5.2 Saran

Untuk itu ada beberapa saran yang dapat di berikan.

- a. Sarana dan prasarana perlu di tingkatkan kualitasnya dan harus di manfaatkan dengan baik untuk menunjang keberhasilan dalam

menurunkan angka kematian ibu. *Ambulance* yang tersedia akan lebih optimal bila di sediakan satu unit khusus untuk gawat darurat dan satu *ambulance* untuk kegiatan puskesmas keliling. Dengan kekurangan sarana dan prasarana menjadi penyebab lamanya pasien untuk mendapatkan rujukan di karenakan pengambilan keputusan dari keluarga yang lama.

- b. Dengan meningkatkan penyuluhan, pembagian pamflet dan brosur makanan bergizi dan pemberian informasi tentang kehamilan kepada masyarakat khususnya ibu hamil sehingga materi yang di berikan dapat di serap, di pahami dan di laksanakan. Akan lebih optimal apabila semua Pemerintah Kabupaten Batu Bara berperan aktif, mendukung dan melaksanakan semua program percepatan penurunan angka kematian ibu. Selain itu juga perlu dukungan pihak swasta baik dalam pembiayaan program kesehatan maupun partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta. Hal ini bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan dapat di ikuti oleh pihak-pihak lain sehingga ibu selamat. Untuk pelaksanaan dan pengembangan program yang efektif dan terarah, maka di harapkan pelaksanaan program penurunan angka kematian ibu dapat di bekali dengan buku pedoman Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Penurunan Angka Kematian Ibu (RAN-PPAKI) 2013-2015 yang di terbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azwar. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alexander, Abe. 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universal Press.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- HAW. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karianga, Hendra. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kountor, D. M. S, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis*: PPM.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moelong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhadjir. 2002. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

- Nasution. 2006. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Subarsono, A. G. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta: Balairung.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

Internet:

- <http://fadlikajol.blogspot.com/2015/08/peranan-bappeda-dalamperencanaan.html>
- <http://eprints.stainkudus.ac.id/607/6/File%206.pdf>

Jurnal:

- Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 1, Januari 2012, Gusti Zulkarnain Tompo (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin), Andi Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin), A. Murfhi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin). Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto.
<https://docplayer.info/44776541-Analisis-peranan-bappeda-dalam-pembangunan-di-kabupaten-jeneponto-skripsi-untuk-memenuhi-sebagian-persyaratan-untuk-mencapai-derajat-sarjana-s-1.html> (di akses pada tanggal 17 September 2020. 11:18 WIB).

Naskah Publikasi. Febri Ramadhan. NIM 12565201126. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang 2017. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Periode 2010-2015.

http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/JURNAL-FEBRI.pdf (di akses pada tanggal 22 September 2020. 21:47 WIB).

Jurnal Aisyah Ahma dan Lena Satlita, M.2016, Universitas Negeri Yogyakarta. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Wonosobo, 2016.

<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/viewFile/9235/8917>. (di akses pada tanggal 25 Februari 2021. 15:12 WIB).

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, ISSN2477-2631, Fahrizanur, Dr. Rita Kalalinggi M.Si, Drs. H Burhanudin, M.Si. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan pembangunan Di Daerah Kabupaten Paser.

[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20\(10-26-17-09-32-01\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20(10-26-17-09-32-01).pdf). (di akses pada tanggal 27 Februari 2021. 20:47 WIB).

Skripsi. Syamsidar, NIM 105710219115, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2020. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Kota Makassar.

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10862-Full_Text.pdf. (di akses pada tanggal 2 Maret 2021. 12:36 WIB).

Tesis. Soleman Andryan Dapakuri, 18610012, Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "Apmd" Yogyakarta, 2020. Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Di Bappeda Kabupaten Sumba Barat).

<http://repo.apmd.ac.id/1353/1/TESIS%20SOLEMAN%20ANDRYAN%20DAPAKURI.pdf>. (di akses pada tanggal 2 Maret 2021. 13:31 WIB).

Jurnal. Rahardian Tetra Andrianto, 14010112140131, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2014. Peran Bappeda Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Pembangunan Sanitasi Di Desa Jambu Kabupaten Semarang.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-9cb-3dXvAhVHeX0KHbOaCI44ChAWMAR6BAgOEAM&url=https%3A%2F%2Fjournal3.undip.ac.id%2Findex.php%2Fjpls%2Farticle%2Fdownload%2F15953%2F15413&usg=AOvVaw1TiMR1KSa1rdByzWG3a_FK. (di akses pada tanggal 5 Maret 2021. 18:12 WIB).

Jurnal Volume 3 Nomor 1 Maret 2012. Agus Iskandar P. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. JL. Soekarno Hatta Bandar Lampung. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Di Bidang Pembangunan Di Kabupaten Tanggamus.

<https://core.ac.uk/download/pdf/295241534.pdf>. (di akses pada tanggal 7 Maret 2021. 15:26 WIB).

Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara. Fakultas Universitas Lampung. Vol 5, Nomor 1 (2018). Nabila Zataadini, Sri Sulastusi, S.H., M.Hum. Eka Deviani, S.H., M.H. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan Dan Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Lampung Utara.

<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/582302>. (di akses pada tanggal 7 Maret 2021. 20:46 WIB).

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

KEPRES Nomor 27 Tahun 1980. Bab I tentang Kedudukan Bappeda.

Lampiran 1 Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan															
	Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Mei 2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penulisan	■															
Seminar Proposal		■														
Revisi Proposal					■	■	■	■								
Pengumpulan Data									■	■	■	■				
Analisis Data															■	■

Lampiran 2

Dokumen Wawancara



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara



Gambar 4. Wawancara dengan Lurah Limapuluh Kota Kabupaten Batu Bara



Gambar 5. Wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara



Gambar 6. Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara



Gambar 7. Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kantor Camat Laut Tador



Lampiran 3

Surat Riset Penelitian


UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA

Program Magister : Ilmu Administrasi Publik – Agribisnis - Ilmu Hukum – Psikologi
Program Doktor : Ilmu Pertanian

Jl. Setia Budi No. 79-B Tj. Rejo Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara 20112 Indonesia
 Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331

Nomor : 929 /PPS-UMA/WDI/01/II/2021
 Lampiran : -
 Hal : *Pengambilan Data dan Wawancara*

23 Februari 2021

Yth. *Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **Firman Pane**
 N P M : **191801053**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
 Judul Tesis : **Analisis Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kematian Ibu Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016)**

Untuk melaksanakan pengambilan data di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara sebagai bahan melengkapi tugas tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Direktur Bidang Akademik,

Dr. Ismail, SH, M.Hum

CC. File

Kampus Utama : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878 Fax. (061) 7366998 Medan 20223

Lampiran 4

Surat Hasil Riset Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS KESEHATAN

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 49 TELP. (0622) - 96784
LIMA PULUH – 21255

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 3283 / 2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. Deni Syahputra
NIP : 19820508 201001 1 025
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Firman Pane
NPM : 191801053
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Universitas : Universitas Medan Area

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara selama 17 (Tujuh Belas) hari kerja mulai dari tanggal 25 Februari 2021 s.d. 19 Maret 2021 untuk memperoleh data penyusunan Tesis yang berjudul : "Analisis Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lima Puluh, 23 Maret 2021

An KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATU BARA
SEKRETARIS

dr. Deni Syahputra
NIP. 19820508 201001 1 025